

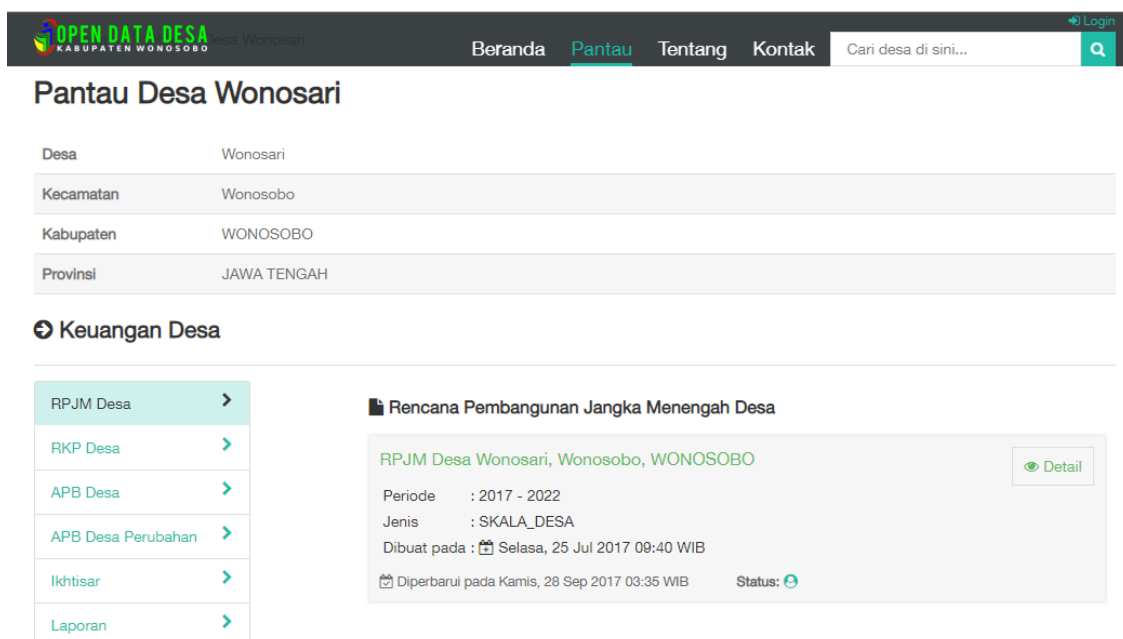
“WONOSARI MAER”

Dewasa ini, keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang sangat krusial. Terbukti dengan semakin kritisnya masyarakat menanggapi berbagai informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal-hal ini dapat dijadikan indeks penilaian dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga untuk mengimbangi kesadaran masyarakat ini, pemerintah kemudian mulai mengembangkan berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik.

Desa Wonosari, Kecamatan Wonosobo memiliki slogan “WONOSARI MAER” yang berarti Wonosari Bagus/Baik. Desa Wonosari juga memiliki beberapa indikator pengukuran yang dapat menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah cukup baik. Indikator tersebut antara lain :

1. TRANSPARANSI

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Desa Wonosari sudah menerapkan *e-planing* dan *e-budgeting* sejak tahun 2017. Semua perencanaan dan pelaporan keuangan sudah dilakukan secara digital yang bisa dipantau oleh masyarakat umum kapanpun dan dimanapun. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggunakan sebuah portal yang dapat diakses oleh siapapun yaitu <https://datadesa.wonosobokab.go.id> . Dengan adanya portal tersebut, diharapkan masyarakat bisa mengawal perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pembangunan desa dengan berpartisipasi aktif dalam mengusulkan dan memberikan umpan balik dalam tampilan data terbuka ini.



The screenshot shows the 'OPEN DATA DESA KABUPATEN WONOSOBO' portal. The navigation bar includes 'Beranda', 'Pantau', 'Tentang', and 'Kontak', along with a search bar and a 'Login' button. The main heading is 'Pantau Desa Wonosari'. Below this, a table lists administrative details: Desa (Wonosari), Kecamatan (Wonosobo), Kabupaten (WONOSOBO), and Provinsi (JAWA TENGAH). A sidebar menu on the left lists 'RPJM Desa', 'RKP Desa', 'APB Desa', 'APB Desa Perubahan', 'Ikhtisar', and 'Laporan'. The main content area displays 'Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa' for 'RPJM Desa Wonosari, Wonosobo, WONOSOBO', with details: Periode (2017 - 2022), Jenis (SKALA_DESA), Dibuat pada (Selasa, 25 Jul 2017 09:40 WIB), and Diperbarui pada (Kamis, 28 Sep 2017 03:35 WIB). A 'Detail' button is visible next to the title.

Tampilan portal opendata desa <https://datadesa.wonosobokab.go.id>

Selain menggunakan portal yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Desa Wonosari juga selalu menginformasikan APBDes dan Laporan Realisasi melalui baliho yang dipasang di setiap dusun atau di tempat-tempat yang strategis. Untuk perencanaan, Pemerintah Desa Wonosari selalu memasang rancangan atau draft perencanaan di papan informasi yang ada.



Baliho APBDes 2019



Baliho Laporan Realisasi APBDes 2018



Papan Informasi

Di era digital ini, Pemerintah Desa Wonosari berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pemerintah Desa Wonosari memiliki website serta beberapa akun media sosial seperti *instagram* dan *facebook*. Dengan adanya media sosial tersebut, diharapkan keterbukaan informasi dapat tersampaikan dengan lebih luas dan masyarakatpun berhak untuk memberikan kritik maupun masukan demi kemajuan Desa Wonosari.



Tampilan Website Desa Wonosari <https://wonosari-wonosobo.wonosobokab.go.id>



Tampilan intagram Desa Wonosari <https://www.instagram.com/wonosariwonosobo/?hl=id>



Tampilan facebook Desa Wonosari

<https://www.facebook.com/pemdeswonosariwonosobo.pemdeswonosariwonosobo>

2. PARTISIPASI

Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu Pemerintah Desa mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi Pemerintah Desa untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah Desa Wonosari selalu melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut, semua kalangan masyarakat berhak mengajukan pendapatnya. Selain dalam musyawarah, masyarakat juga dapat menyampaikan pendapatnya melalui portal.opendata.desa, website,

maupun media sosial yang ada. Pemerintah Desa Wonosari juga menyediakan meja layanan informasi, sehingga masyarakat yang ingin meminta data bisa datang langsung ke kantor desa.



Meja Layanan Informasi

3. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

4. KOORDINASI

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Pemerintah Desa Wonosari selalu melakukan koordinasi baik dengan lembaga desa maupun dengan masyarakat dalam mengambil sebuah kebijakan.

Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.